

Peranan *Green Economy* Menjadi Strategi Dalam Memperbaiki Pemulihan Ekonomi Serta Multilateral

I Kadek Donny Wishanesta

Universitas Mahendradatta, Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115
donnynesta28@gmail.com

Abstract

The green economy concept is one of the global strategies related to social, economic, and environmental crises. Methodologically, conceptualizing, implementing, and critiquing the creation of a green economy paradigm towards society leads to the challenge of a global strategy that has the goal of sustainability, poverty alleviation, and inclusion of vulnerable social sectors. The influence of the green economy on the sustainability of life is still in the context of *grahita*. The purpose of this research is to determine the effect of the green economy on economic recovery and multilateral problems. This research is a descriptive research that uses a literature study type or approach. The results of the study reveal that the application of a green economy is capable of driving national economic recovery as well as problems in the multilateral sector. In order for a green economy to be realized for the country, policy makers must be supported by various parties so that a sustainable green economy is formed. A green economy also contributes to maintaining a healthy environment and shaping ecosystems appropriately for present and future generations.

Keywords: Green Economic, Multilateral, Economic Recovery

Abstrak

Konsep ekonomi hijau merupakan salah satu strategis global yang berkaitan dengan krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terciptanya paradigma terhadap ekonomi hijau dari masyarakat secara metodologis, konseptualisasi, implementasi, dan kritik mengarah kepada tantangan strategi global yang memiliki tujuan keberlanjutan, pengentasan kemiskinan, dan inklusi sektor sosial yang rentan. Pengaruh ekonomi hijau terhadap keberlanjutan kehidupan masih dalam konteks *grahita*. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh ekonomi hijau terhadap pemulihan ekonomi dan masalah multilateral. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan jenis atau pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan ekonomi hijau mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional serta permasalahan dibidang multilateral. Agar ekonomi hijau terealisasi bagi negara maka pembuat kebijakan harus didukung oleh berbagai pihak sehingga terbentuk ekonomi hijau yang berkelanjutan. Ekonomi hijau juga berkontribusi untuk memelihara lingkungan yang sehat dan membentuk ekosistem secara tepat untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang

Kata kunci: Ekonomi Hijau, Multilateral, Pemulihan Ekonomi

Copyright (c) 2024 I Kadek Donny Wishanesta

✉Corresponding author: I Kadek Donny Wishanesta

Email Address: donnynesta28@gmail.com (, Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115)

Received 27 January 2024, Accepted 31 January 2024, Published 3 February 2024

PENDAHULUAN

Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi pandemi pada tahun 2020 saat masyarakat di seluruh dunia berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dan mengelola biaya kesehatan. Krisis ekonomi global terbesar dalam lebih dari seratus tahun disebabkan oleh pembatasan mobilitas dan tindakan kesehatan masyarakat lainnya yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemi. Pandemi memperburuk penurunan permintaan karena dampaknya terhadap perilaku konsumen. Pada tahun 2020, sebagai tahun pertama pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan ekonomi global, aktivitas ekonomi di sekitar 90% negara mengalami penurunan. Ini lebih besar dari penurunan negara lain seperti perang dunia, depresi tahun 1930-an,

krisis utang ekonomi tahun 1980-an, dan krisis keuangan global 2007–2009.

Pemerintah memberlakukan tindakan kebijakan yang cepat dan menyeluruh dengan menggunakan kebijakan sektor fiskal dan moneter untuk membatasi dampak krisis terhadap rumah tangga dan bisnis. Banyak negara memberlakukan tindakan darurat secara masif sebagai respons terhadap gelombang pertama pandemi. Mereka menerapkan tindakan darurat yang tegas dan berbagai instrumen kebijakan untuk mengurangi dampak langsung dari krisis.

Ketika dampak ekonomi dari pandemi berlanjut, pembuat kebijakan memiliki peran vital dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara memberikan dukungan yang cukup dalam mengurangi krisis tapi di sisi lain juga membatasi risiko keuangan dan makroekonomi jangka panjang yang dapat muncul dari tingkat utang yang lebih tinggi akibat krisis. Risiko-risiko tersebut kemungkinan besar muncul lebih cepat di negara-negara berkembang dan terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dikarenakan daya dukung utang publik dan swasta jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju, dan bahkan sebelum pandemi, ekonomi negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih besar.

Pandemi akan memiliki dampak ekonomi yang lebih lama dan lebih parah bagi negara berkembang. Sekitar empat puluh persen negara maju pulih dari penurunan pendapatan per kapita global pada tahun 2020 dan melampaui tingkat output mereka pada tahun 2021 (IMF, 2021). Penerapan kebijakan yang tepat diperlukan untuk mencapai "pemulihan yang adil" yang mencakup masyarakat miskin, perempuan, dan usaha kecil untuk pulih dari kehilangan pekerjaan, pendapatan, modal manusia, dan aset. COVID-19 telah memperluas ketidaksetaraan global.

Pembuat kebijakan harus memprioritaskan kegiatan *green economy* yang menghasilkan produk dan menciptakan lapangan kerja untuk menjaga iklim ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Oleh karena itu, untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, konsep *green economy* harus mendukung kemakmuran dan keadilan pelaku pasar domestik. Tujuan dari *green economy* adalah untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan ekonomi mikro dan makro.

Selain itu, ketidakpastian kebijakan perdagangan yang meningkat dan keretakan rantai pasokan yang berkontribusi pada tren fragmentasi geoekonomi diperkirakan akan memperlambat pemulihan ekonomi dan memperburuk jaringan produksi Asia, yang telah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari pendalaman perdagangan global selama beberapa dekade. Selain itu, tekanan inflasi di Asia meningkat, didorong oleh lonjakan global dalam biaya bahan bakar dan makanan akibat perang dan konflik. Kaum miskin dan rentan menghadapi akibat yang paling parah, karena mereka paling tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi, mengurangi konsumsi, dan meningkatkan kemungkinan kerusuhan sosial.

Sebagai perwakilan dari ekonomi berkembang, Indonesia adalah fokus utama kepresidenan

G20, yang dilihatnya sebagai forum untuk mengatasi kesenjangan pemulihan global pasca-COVID. Mereka juga ingin meningkatkan pengakuan internasional Indonesia sebagai ekonomi berkembang terkemuka serta kesiapan untuk kembalinya investasi, pariwisata, dan fokus pada Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Agenda KTT G20 akan mengharuskan negara maju dan berkembang bekerja sama. Agenda tersebut mungkin gagal jika perhatian negara-negara terputus dan negara-negara penting tidak mau mengesampingkan krisis di Eropa. Oleh karena itu, Indonesia telah berusaha mengakomodasi kepentingan bersama untuk mengamankan kehadiran para pemimpin ekonomi dunia dan mencegah tuan rumah yang berbahaya.

Studi penelitian ini, yang menguji peraturan tentang bagaimana menerapkan *green economy* dan peran institusi dalam mendukungnya. Dilakukan kebijakan fiskal untuk mendorong *green economy* untuk pemulihan ekonomi dan mitigasi iklim (Makmun, 2016). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada kebijakan yang harus diterapkan untuk mencapai ekonomi hijau. Penelitian ini mengkaji manfaat penerapan ekonomi hijau untuk pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah antar negara (Makmun, 2016). Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian dan pemahaman tentang kebijakan yang menerapkan ekonomi hijau.

METODE

Studi literatur atau kepustakaan adalah metode penelitian yang digunakan. Studi kepustakaan adalah serangkaian tindakan yang mencakup membaca, mencatat, mengolah, dan mengumpulkan data. Sugiyono mengatakan bahwa studi kepustakaan adalah studi tentang nilai, norma, dan budaya yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti, serta literatur ilmiah dan referensi. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Informasi ini dikumpulkan dari berbagai laporan institusi, artikel ilmiah, buku, website, dan aturan yang relevan. Penerbit jurnal yang kredibel adalah pusat sumber data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2013). Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kritis. Analisis kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai – nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan teks/data yang ditafsirkan. Analisis sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ahli yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ahli tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Permasalahan Ekonomi Dan Multilateral

Sejak reformasi keuangan yang diusulkan oleh G20 setelah krisis ekonomi 2008, pandemi COVID-19 merupakan tantangan pertama bagi sistem keuangan global. Berbeda dengan krisis tahun 2008, guncangan ini berasal dari sumber yang tidak terkait dengan sistem keuangan. Langkah-langkah penahanan yang diambil pemerintah sebagai akibat dari pandemi COVID-19 telah menghentikan aktivitas ekonomi riil secara mendadak dan menempatkan sistem keuangan di bawah tekanan yang sangat tinggi, menyebabkan tekanan likuiditas yang sangat tinggi. Diikuti oleh langkah-langkah kebijakan yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk menahan krisis ekonomi dan menstabilkan pasar, pembuat kebijakan harus mempertahankan untuk mendukung ketahanan keuangan dan memastikan aliran pembiayaan yang berkelanjutan ke ekonomi riil sebagai tanggapan terhadap peningkatan ketidakpastian ekonomi dan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Sistem keuangan global telah mengalami perubahan dramatis selama sepuluh tahun terakhir sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Struktur dan operasi sistem keuangan telah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti reformasi penyesuaian yang didorong pasar setelah krisis keuangan 2008, perubahan teknologi, dan pertumbuhan lembaga keuangan non perbankan. Pandemi menghadapi tantangan yang lebih besar dari krisis keuangan 2008 di sistem keuangan global. Namun, pengalaman pandemi menunjukkan ketidaksamaan ketahanan di sektor keuangan. Namun, komponen utama sistem keuangan telah bertahan dan mengatasi perubahan. COVID-19 telah menarik perhatian pada beberapa masalah prosiklikalitas sistem keuangan yang mungkin memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Sistem keuangan memiliki sifat siklis, tetapi mengatasi faktor-faktor yang memperbesar transmisi guncangan dalam sistem keuangan dan ekonomi riil adalah peran penting kebijakan makroprudensial.

Indikator Green Economy

Salah satu indikator makro yang sangat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan oleh peningkatan barang dan jasa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memiliki makna yang signifikan bagi masyarakat (Palmer, 2012). Menurut Arka (2021), pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Arkas, 2021). Akibatnya, setiap pemerintahan harus berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil (Aminata, 2022). Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil, tampaknya pertumbuhan tersebut belum berdampak positif pada masyarakat baik saat ini maupun di masa depan. Ditunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi tidak merata dan menyeluruh.

Pemerataan pendidikan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan modal manusia yang dapat membantu konvergensi kondisi ekonomi Indonesia. Beberapa studi juga menunjukkan dampak

pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Selain itu, efek pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat di masa mendatang harus diukur. Karena pertumbuhan ekonomi akan menjadi beban yang berlebihan bagi planet ini di masa mendatang. Sangat penting untuk mengukur dampak ekonomi terhadap lingkungan karena lingkungan telah menyediakan berbagai sumber daya yang dapat membantu masyarakat memproduksi barang dan jasa. Menginternalisasikan konsep pertumbuhan hijau adalah salah satu cara untuk mengukur dan mengevaluasi dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang. "Pertumbuhan hijau" adalah istilah yang tepat karena mengacu pada peningkatan aktivitas ekonomi sambil mempertahankan efisiensi konsumsi sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Banyak penelitian telah mencoba menentukan indikator pembentuk pertumbuhan hijau inklusif dan mengukurnya. Aset alam, risiko dan ketahanan, efisiensi dan decoupling sumber daya, peluang dan upaya ekonomi, dan inklusi adalah indikator yang membentuk *Green Growth Knowledge Platform* (2016). Tingkat lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja, harapan hidup sehat, pendapatan rumah tangga rata-rata, tingkat kemiskinan.

Ekonomi Hijau Sebagai Langkah Keluar Dari Krisis

Karena masyarakat mempertimbangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan produktif terhadap lingkungan alam, yang menyebabkan pencemaran pada sumber daya air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati, yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi dan lingkungan saat ini sangat berinteraksi satu sama lain. Adanya kesadaran ini memungkinkan untuk mencari alternatif yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tindakan dan peraturan yang dibuat oleh negara dan organisasi sosial bertujuan untuk mengendalikan, meminimalkan, memperbaiki, dan mencegah dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi pada sistem alam.

Green Economy bergantung pada tiga strategi utama: pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya alam, dan pencegahan kehilangan jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati. Strategi ini memungkinkan ekonomi untuk mencapai pembangunan dengan emisi rendah karbon, sumber daya yang efisien, dan inklusif secara sosial. Untuk menerapkan strategi ini, investasi publik dan swasta diperlukan, serta reformasi politik dan perubahan peraturan. Oleh karena itu, melestarikan, memperkuat, dan membangun kembali modal alam untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat umum sangat penting. Pengentasan kemiskinan adalah salah satu tindakan utama yang diupayakan oleh ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga kualitas hidup yang lebih baik dapat dijamin tanpa mempengaruhi sumber daya alam. Menyebarkan gagasan ekonomi hijau tanpa mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan dan kerusakan alam adalah kesalahan karena pemulihan dinamika sosial dan lingkungan tidak dapat dijamin dalam waktu singkat, menengah, atau jangka panjang.

Green Economy yang mencakup modal fisik, teknologi, keuangan, dan kekayaan, dihasilkan

oleh ketergantungan yang berlebihan pada bahan bakar fosil, penipisan sumber daya alam, dan kerugian lingkungan. Sebaliknya, modal alam adalah kunci pertumbuhan ekonomi hijau. Untuk melakukan transisi menuju ekonomi hijau, delapan sektor ekonomi utama harus dipertimbangkan. Sektor-sektor ini harus dapat mengurangi kemiskinan, berinvestasi dalam modal alam dan memperbaikinya, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesetaraan sosial, dan mendorong energi terbarukan dan efisiensi energi.

Pertimbangan penting lainnya untuk mencapai transisi ke ekonomi hijau ditemukan di tingkat internasional dalam perjanjian lingkungan multilateral, kerangka hukum dan kelembagaan ditetapkan untuk mengatasi tantangan lingkungan global (Aidt, 2010). Perjanjian ini termasuk the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan pembaruan perjanjian pasca-Kyoto untuk karbon. Tapi di dengan cara yang sama, semua pertimbangan ini tidak dapat ditangani secara tidak jelas untuk semua negara, tetapi cara yang berbeda harus diusulkan dalam hal pendekatan ekonomi hijau, yang diusulkan untuk membagi negara-negara menjadi tiga kelompok dengan karakteristik tertentu. Pada saat yang sama dengan beberapa tingkat tanggung jawab sebagai berikut:

1. Negara-negara maju memiliki peran perintis dan berkewajiban untuk mengubah pola produksi dan konsumsi mereka.
2. Negara berkembang: dengan kemungkinan mencapai tujuan mereka dalam skema keberlanjutan.
3. Negara-negara industri: yang harus menjamin bantuan keuangan dan teknologi kepada negara-negara berkembang.

Solusi Multilateral Untuk Tantangan Global

Dengan Prioritas Ekonomi untuk Aksi Multilateral Pertama, vaksin. Saat ini, kebijakan vaksin merupakan kebijakan ekonomi yang paling penting. Berinvestasi untuk memastikan setiap orang dengan cepat memiliki akses ke vaksin mungkin merupakan proyek publik dengan keuntungan tertinggi. Prediksi kemajuan yang lebih cepat dalam mengakhiri krisis ini akan menambah hampir \$9 triliun ke PDB global pada tahun 2025, memungkinkan lebih dari \$1 triliun pendapatan pajak tambahan. Tindakan internasional yang terkoordinasi pada vaksin adalah kunci.

Pajak internasional Secara luas merupakan kepentingan negara dan sektor swasta untuk membatasi persaingan pajak dan proliferasi tindakan pajak sepihak yang kacau. Upaya multilateral sudah berjalan dengan Kerangka Inklusif yang diprakarsai oleh OECD yang sekarang mencakup 139 negara. Jenis pendekatan terkoordinasi ini akan membantu menyederhanakan sistem yang terlalu rumit, menyelaraskan insentif dengan lebih baik, dan memberikan prediktabilitas. Ini juga akan membantu menciptakan sistem yang adil terhadap perusahaan untuk membayar pajak di negara tempat mereka beroperasi.

Kebijakan dapat diimplementasikan melalui pajak karbon, sistem perdagangan, atau tindakan setara lainnya yang sesuai dengan preferensi kebijakan lokal. Yang terpenting, harga dasar seperti itu

dapat menghindari penyesuaian perbatasan yang kurang efisien jika beberapa negara melanjutkan dengan penetapan harga yang kuat sementara yang lain tidak. Berfokus pada pemulihan yang lebih ramah lingkungan jelas membuka prospek. Tetapi kenyataan pahitnya adalah bahwa negara-negara miskin berisiko kehilangan transformasi bersejarah ini. Penelitian IMF menunjukkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah membutuhkan \$450 miliar selama lima tahun untuk memerangi pandemi, mempertahankan penyangga, dan kembali ke jalur mengejar tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Mereka hanya dapat menutupi sebagian dari ini sendiri. Kerangka Kerja Umum G20 juga merupakan inisiatif penting untuk mengatasi kerentanan utang dan menciptakan ruang kebijakan di negara-negara berpenghasilan rendah. Dan di sini, lembaga sektor keuangan swasta memiliki peran kunci dalam restrukturisasi utang, tidak hanya dari sudut pandang pembagian beban yang lebih adil, tetapi juga untuk membantu menghindari krisis utang berlarut-larut yang merugikan pertumbuhan.

Perubahan iklim adalah tantangan global pola dasar, karena emisi gas rumah kaca dari setiap negara memiliki dampak global. Oleh karena itu, upaya internasional untuk mengatasinya cenderung dibingkai sebagai cara untuk mengatasi masalah aksi kolektif. Pemahaman ini mengamanatkan tanggapan multilateral terhadap perubahan iklim yang diselenggarakan skala kolektif. Dari perspektif kelembagaan, kerja sama iklim dapat dilihat sebagai sesuatu dari kisah sukses multilateral. Meskipun demikian perubahan iklim semakin cepat. Sistem multilateral global sejauh ini tidak mampu menghambat dampak bencana yang akan menjadi jauh lebih serius selama beberapa dekade mendatang.

Sementara didasarkan pada realitas nasional, investasi stimulus perlu berlabuh dalam kesepakatan bersama yang menyediakan peta jalan bersama untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Namun, agar multilateralisme dapat berjalan dibutuhkan semua pihak untuk bekerja sama. Dibutuhkan kepercayaan dan transparansi, kepemilikan dan optimisme. Dibutuhkan tujuan yang dapat dirinci dan diimplementasikan di tingkat nasional dan tindakan nasional yang mendukung tujuan internasional. Sebagai kesimpulan dana stimulus perlu diinvestasikan dalam transisi hijau. Harus inklusif, pro-miskin, dan responif gender. Di dunia pascapandemi hanya multilateralisme yang dihidupkan kembali yang dapat memberikan hasil terbaik untuk investasi dan mewujudkan dunia yang hidup selaras dengan alam, iklim yang stabil, dan planet yang bebas polusi.

Proyeksi Implikasi Kebijakan

Dalam jangka panjang kebijakan pertumbuhan hijau dapat meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya dan produktivitas, mendorong kegiatan ekonomi berlangsung di tempat yang memberikan keuntungan terbaik bagi masyarakat dalam jangka panjang, serta mengarah pada cara-cara baru dan inovatif untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Penerapan kebijakan yang dapat dilakukan misalnya membuat kebijakan dalam menurunkan emisi polutan udara, membatasi energi dan intensitas karbon ekonomi, hingga mengurangi abstraksi air tawar dan dalam memperluas jumlah kawasan lindung. Ada juga bukti bahwa pemisahan absolut antara pertumbuhan ekonomi dan emisi CO₂ (emisi tidak lagi dikaitkan sama sekali dengan pertumbuhan)

telah terjadi di beberapa negara, meskipun lebih jarang dibandingkan dengan decoupling relatif (peningkatan emisi lebih kecil dari pertumbuhan), seperti keanekaragaman hayati dan air. Analisis efek pertumbuhan hijau pada kemiskinan dan ketidaksetaraan sering terbelakang dan banyak negara tidak memiliki strategi pertumbuhan hijau secara keseluruhan untuk sektor-sektor utama seperti pertanian. Kesadaran akan perlunya mengintegrasikan masalah lingkungan ke pembangunan atau rencanapengurangan kemiskinan di negara berkembang sedang mengalami tren kenaikan.

Green patents adalah pendorong penting inovasi hijau. Inovasi yang berhasil lebih mungkin terjadi pada ekonomi atau sektor yang tumbuh cepat. Oleh karena itu kebijakan yang mendorong difusi, memperkuat pasar untuk inovasi ramah lingkungan, dan mengubah perilaku pengguna perlu dipertimbangkan. Secara khusus, regulasi zat dan aktivitas berbahaya, standar kinerja, label hijau dan sertifikat, serta standar berbasis teknologi tampaknya menjadi salah satu instrumen yang paling sukses. Pengadaan publik dan subsidi konsumen juga dapat membantu memastikan kelayakan ekonomi dan difusi layanan produk yang ramah lingkungan. Kebijakan tersebut perlu dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa mereka mendukung dan tidak mendistorsi pembentukan pasar. Ini membutuhkan campuran kebijakan dalam kerangka kebijakan yang koheren.

Banyak kondisi pendukung yang sama untuk inovasi hijau dengan inovasi secara lebih umum. Misalnya sistem hak kekayaan intelektual yang dirancang dengan baik penting untuk memberikan insentif bagi inovasi dan penyebaran teknologi baru. Pendekatan yang optimal adalah menggabungkan pajak yang dikenakan langsung pada kegiatan yang merusak lingkungan dengan kebijakan luas yang mengatasi hambatan utama inovasi.

KESIMPULAN

Ekonomi hijau menjadi model yang mendorong pertumbuhan, penciptaan pendapatan dan lapangan kerja yang berupaya mengubah interaksi antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan terutama jika kekayaan diukur dengan mempertimbangkan aset alam dan bukan hanya produktivitas. Ekonomi hijau berkontribusi secara substansial dalam mengurangi ketimpangan sosial antar negara dan mengentaskan kemiskinan di dunia. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi ekonomi hijau dapat mencapai perubahan teknologi yang memungkinkan penerapan strategi lingkungan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan limbah dari aktivitasnya dapat dimasukkan kembali ke dalam proses produksi sehingga mengurangi penyebab polusi. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus diterapkan alternatif kebijakan ekonomi hijau yang dikembangkan melalui alokasi sumber daya ekonomi, peraturan lingkungan yang lebih ketat, penciptaan subsidi, hingga kegiatan ramah lingkungan dan optimalisasi proses perencanaan wilayah. Perlu adanya pembentukan kerangka kerja ekonomi baru yang memungkinkan untuk diterapkan tanpa mengabaikan premis fundamental pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dengan melibatkan sektor-sektor sosial yang rentan untuk mencapai pembangunan ekonomi dalam parameter keberlanjutan

yaitu pemeliharaan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang layak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka menengah dan panjang akan terdapat keuntungan dalam menerapkan ekonomi hijau. Ekonomi hijau pada dasarnya dapat menjadi alat menangan ekonomi hingga masalah multilateral. Penerapan kebijakan yang tepat disertai dengan pemantauan dan keterlibatan berbagai pihak sangat memungkinkan fungsi ekonomi hijau akan tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi negara dan internasional.

Banyak tantangan yang dihadapi negara dalam menggerakkan perekonomiannya ke arah yang lebih ramah lingkungan. Di satu sisi hal ini tidak boleh menghalangi upaya untuk segera memasukkan unsur- unsur lingkungan ke dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain berbagai kendala harus diidentifikasi dan kerjasama internasional harus diambil untuk memungkinkan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. Perlakuan terhadap ekonomi hijau harus konsisten dengan konsep, prinsip, dan kerangka pembangunan berkelanjutan serta harus diperhatikan agar tidak mengurangi atau menyimpang dari pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi hijau juga dipahami mencakup: dimensi sosial, kesetaraan dan pembangunan, serta reformasi ekonomi global yang harus ditangani secara memadai.

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki keterbatasan berupa waktu penelitian serta variabel penentu keberhasilan ekonomi hijau. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian dan variabel penentu keberhasilan ekonomi hijau yang lebih bervariasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Rekan-rekan yang keikutsertaan dalam meneliti pada *green economy* pada penelitian saya. Kesediaan kalian untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sangat saya hargai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan praktisi pendidikan dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahendradatta Saran dan masukan yang telah diberikan sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini dan penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan.

REFERENSI

- A.K., N., & Setiawan, N. (2021). Review Program Pemulihan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1).
- Aidt. (2010). Green Taxes: Refunding Rules and Lobbing. *J. Environ. Econ. Manag*, 31–43.
- Aminata, J. (2022). The Analysis of Inclusive Green Growth In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1).

- Anwar .A. (2018). Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia: Pendekatan Model Panel Dinamis. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1), 50–60.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Arkas. (2021). The Effect of Private Investment and Capital Expenditure on Economic Growth and Income Inequality in Bali Province. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(6), 262–267.
- BAPPENAS. (2019). *Low Carbon Development : A Paradigm Shift Towards a Green Economy*.
- BPS. (2022). *Gini Ratio Market 2022*. Economic. (2020). *Bilateral Trade By Product*.
- ESCAP. (2014). *Green Growth Indicators: A Practical Approach for Asia and the Pacific*.
- Ilham, M, & Pangaribowo, E.H.(2017). Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Bumi Indonesia*
- Kusumaningrum, S & Yuhan, RJ.(2019).Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusi dan Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. *Jurnal economy dan kebijakan public*.
- Palmer. (2021). *The important of Economy Growth*
- Ruta.(2022). *How the War in Ukrain is Reshaping World Trade and Invesment*
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Srinivasan. (2022). *Asia’s Economy Face Weakening Growth, Rising Inflation Pressures*.
- World Bank (2021). *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development in OECD Observer*